

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dan Persiapan Menuju Pembelajaran Tatap Muka

Pemateri :

- 1. Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.**
- 2. Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud-Ristek.**
- 3. Gianina Amadira, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI (Mewakili Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI).**
- 4. Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute.**

Moderator : M. Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute.

- Murid yang punya komputer untuk PJJ di Indonesia baru 34% berdasarkan data OECD. Banyak juga yang tidak nyaman saat belajar di rumah.
- Lebih jauh memang desain pembelajaran di Indonesia belum dirancang untuk PJJ. Jadi saat pandemi datang, guru-guru baru belajar menggunakan teknologi.
- Menurut sejumlah data, PJJ memiliki sejumlah dampak positif dan negatif.
- Ada sejumlah perdebatan yang membuat akhirnya PTM tetap dilaksanakan. Misalnya, masih rendahnya tingkat penularan di sekolah.
- Jika melihat situasi di Indonesia, justru PJJ menimbulkan kekhawatiran, karena pelajar yang tergolong anak-anak malah bermain di rumah dengan teman-temannya, sehingga lebih baik jika PTM, namun, dengan mengedepankan protokol kesehatan.
- Perlu diperhatikan juga soal sebaran vaksin bagi para guru. Para guru perlu diberikan prioritas vaksin hingga merata.
- Untuk mempersiapkan PTM sejumlah hal perlu diperhatikan oleh Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidikan, dan Dinas Pendidikan. Misalnya bagi pihak sekolah saat sanitasi.

Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud-Ristek.

- Ada banyak studi yang menyatakan disrupsi selama pandemi dan masa datang bagi anak-anak.

- Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah adanya putus sekolah. Kemudian, turunnya capaian pembelajaran (*learning loss*), kesenjangan dengan daerah yang tertinggal makin besar gapnya karena akses atau kualitasnya jadi turun.
- Terdapat pula masalah kekerasan pada anak, yang tidak terdeteksi dini. Kemudian ada pernikahan dini dan lain sebagainya.
- Secara kualitas, intensitas guru dan murid juga jadi rendah. Belum lagi hambatan internet. Guru juga tidak bisa memantau perkembangan murid secara langsung.
- Jika melihat situasi COVID, terdapat pula sisi positifnya. Guru-guru makin inovatif membuat materi. Kemudian juga sejumlah guru membentuk komunitas belajar untuk meng-*update* wawasan di masa pandemi.
- Adanya komunitas guru belajar salah satunya berbentuk platform *crowdsourcing*. Di sana mereka saling bertukar RPP, mater-materi, dan lain sebagainya. Dalam platform ini guru-guru juga aktif dalam berinteraksi.
- Ada juga situasi yang terbentuk di masa pandemi, merasa nyaman dan tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini membuat para guru mencoba menerobos situasi COVID.
- Pada dasarnya, PTM sudah disosialisasikan sejak Juli 2020 mempertimbangkan zona hijau. Zona kuning juga boleh tapi terbatas. Namun, ada banyak masukan karena penentuan zona berlaku di seluruh kabupaten dan banyak otoritas di sana.
- Kemendikbud memberikan otonomi bagi daerah untuk mengambil keputusan soal PTM terbatas, Dalam hal ini juga orang tua memegang peranan tinggi untuk menentukan apakah anaknya boleh ikut PTM atau tidak.
- PTM terbatas ini masih perlu didorong dengan terus mengencangkan soal pentingnya prosedur-prosedur protokol kesehatan.
- Akselerasi vaksinasi juga kami usahakan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Selain itu, mendorong penggunaan dana BOS untuk mendukung protokol kesehatan

Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

- KPAI melakukan survei selama pandemi. Ada beberapa isu yang disorot.
- Pertama, pembelajaran terlalu bertumpu pada internet. Kedua, tidak dilakukan pemetaan kesenjangan akses digital antar sekolah dan antar daerah. Ketiga, tidak dilakukan pemetaan variasi PJJ atau Belajar di Rumah (BDR) antar sekolah dan antar daerah. Keempat, tidak ada kebijakan praktik BDR yang dapat menjadi panduan dan standar minimal di sekolah maupun daerah.

- Masalah lainnya diantaranya, peran kepala sekolah dalam BDR belum maksimal; Mayoritas guru kota dan guru sekolah swasta lebih sibuk dalam PJJ secara daring; Mayoritas guru desa dan guru sekolah negeri sibuk melakukan kunjungan rumah; Minim Pendampingan orangtua selama BDR.
- Selain itu, rendahnya penguasaan teknologi digital orangtua. Hal ini juga mengingat latar belakang pendidikan orang tua. Di Indonesia ini, 51% orang tua lulusan SD sehingga masih belum banyak yang paham mengenai aplikasi teknologi; Minimnya komunikasi guru dengan ortu selama BDR; Ketiadaan alat daring bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak terlayani dan banyak yang putus sekolah; dan Minimnya Pengawasan penggunaan gadget oleh orang tua sehingga banyak anak mengalami kecanduan *game online* dan pornografi.
- Pada tahun 2020, KPAI melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 9 Provinsi. Hasilnya, hanya 16,7% sekolah yang siap PTM di masa pandemi.
- Pada tahun 2021 (Januari-Mei), KPAI melakukan pengawasan ujicoba tatap muka di 19 sekolah pada 10 kabupaten/kota di 4 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten). Hasil pengawasan menunjukkan angka kesiapan yang cukup tinggi, yaitu hampir 70%.
- Salah satu faktor yang juga berpengaruh adalah kondisi sosial ekonomi. PJJ bisa efektif jika anak juga berasal dari keluarga dengan ekonomi yang lebih baik, dukungan teknologi pun ada. Berbeda dengan keluarga yang beruntung, mereka saja masih kesulitan untuk punya alat dukung pembelajaran berupa komputer.
- Pemda juga diberikan rekomendasi oleh KPAI. Keputusan PTM harus tetap mengedepankan data kasus yang ada, naik atau turun. Jakarta termasuk yang sangat hati-hati dalam buka tutup sekolah.

Gianina Amadira , Tenaga Ahli Komisi X DPR RI (Mewakili Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI).

- Banyak dampak negatif dari PJJ, misalnya, anak harus bekerja, pernikahan anak, dll.
- Adanya keputusan SKB 4 Menteri telah banyak memberikan arahan, namun, masih belum banyak dipahami oleh sekolah-sekolah. Koordinasi dan kolaborasi masih harus dilakukan Satuan Pendidikan, Sekolah, Dinas Pendidikan dll.
- Terkait kebijakan PTM, sekolah juga diberikan arahan untuk melapor kesiapan. Dari data yang ada melalui platform daring sekolah.data.kemdikbud.go.id, baru 54,13% yang melapor kesiapan.
- Tempat lain yang juga perlu disoroti adalah pondok pesantren, ini merupakan ranah Kementerian Agama. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengurus pesantren, pemeriksaan rutin tes COVID juga bahkan belum dilaksanakan berdasar arahan pemerintah.
- Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan yaitu adanya *hotline* pengawasan PTM dan pantauan daring jumlah guru yang telah divaksin.

- Pada dasarnya, mengingat kapabilitas daerah berbeda, perlu dilakukan pembinaan dari Kemendikbud untuk menjalankan kebijakan PTM.
- Hal lain yang bisa dilakukan adalah pembelajaran *outdoor*, yang telah banyak dilakukan banyak negara. Di Indonesia juga telah dilakukan di sejumlah daerah. Program ini dapat dipertimbangkan oleh sekolah-sekolah.

FORUM DISKUSI-TANYA JAWAB

1. Adinda - TII

Apakah murid diberikan suaranya untuk PJJ atau PTM terbatas?

Tanggapan Retno:

- Sekolah izin dari orang tua. Kalau KPAI kami fokus ke anak. Jumlah anak yang setuju PTM Mei-Juni tahun 2020, 63% anak setuju. Orang tua sebaliknya 67% tidak setuju. Guru juga ingin menginginkan sekolah tatap muka.
- Bulan Desember KPAI melakukan survei lagi, angka murid yang setuju 78%, tinggi sekali. Guru justru turun, 49%. Kalau orang tua turun diangka 64%. Jadi yang tidak setuju sekolah dibuka orang tua. Kami mencoba memberi ruang untuk guru dan anak bersuara.
- Dari sejumlah suara yang masuk dari anak-anak, banyak materi yang sulit, sehingga perlu dilakukan PTM misalnya seminggu sekali. Guru disarankan membuat pemetaan materi dari yang ringan, sedang, sulit.
- Selain itu anak SMK juga perlu masuk karena alat-alat yang digunakan mahal, sehingga di DKI SMK dipersilahkan masuk.

2. Hidayatul Rochmah

Bagaimana meminimalkan dampak negatif PJJ bagi ortu?

Tanggapan Nisaaul:

- Jika dari anak, orang tua perlu mengedepankan cara komunikasi yang lebih enak.
- Jika dari sisi orang tua supaya tidak stres, orang tua perlu berkomunikasi dengan guru, bagaimana melakukan pendampingan yang tepat.

Tanggapan Retno:

- Kita tidak bisa bertumpu pada daring, dapat diakali dengan luar ruangan. Misalnya di wilayah pantai dapat di sekitar pesisir. Belum lagi kesenjangan ekonomi. Pada intinya, BDR tidak bisa bertumpu pada BDR.

- Penting juga untuk menjaga psikologi anak. Hak berekspresi, berpartisipasi, dll mereka hilang. Kalau dibentak, dimarahi malah stress. Jika orang tua stres, apalagi karena faktor pekerjaan, coba cari cara melepaskan stres.
- Pembagian peran orang tua juga penting, suami dan istri gentian menjaga anak, anak ingin ditemani.

Tanggapan Gianina:

- Kemendikbud punya dokumen BDR, orang tua bisa mengakses via daring untuk mendapat arahan-arahan.

3. Sughron Jazila – ASN BKN

- Apakah memungkinkan jika dilakukan tatap muka tapi dengan metode *shifting* dengan protokol?

Tanggapan Nisaaul:

- Ini memang direncanakan ya, menggunakan metode *blended learning*. Namun, masih perlu ditinjau lagi.

Tanggapan Hetifah:

- Mungkin saja, tapi bagaimana pun penting untuk terutama kita membangun *support system* bagi anak-anak di masa pandemi.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>.*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

~ TERIMA KASIH ~